

## ABSTRAK

**Aulia Fauzia Rakhman:** *“Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Asas Kecermatan (Studi Kasus Pengadaan Masker Scuba)”*.

Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui pembangunan dan perlindungan terhadap warga negaranya, tidak dapat bertindak semena-mena, dan harus akuntabel. Disamping itu oleh karena tugas dan wewenang pemerintah yang diberikan meskipun secara teoritis bersifat netral, akan tetapi dalam prakteknya berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan, tidak taat azas, dan bahkan digunakan bertentangan dengan hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 berikut disertai kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi yang salah satunya adalah kebijakan pengadaan masker scuba yang menelan anggaran mencapai Rp. 8 milyar tetapi tidak direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, untuk mengetahui implementasi kebijakan pengadaan masker scuba oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca larangan penggunaan masker scuba oleh pemerintah pusat dan untuk mengetahui kendala dan upaya dalam implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19..

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan memberikan gambaran mengenai subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan: Bahwa proses penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada prinsipnya harus berdasarkan pada proses pembuatan kebijakan publik yang merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Implementasi kebijakan pengadaan masker scuba oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca larangan penggunaan masker scuba oleh pemerintah pusat adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap jenis kain yang digunakan agar menjadi sesuai standar. Sedangkan bagi masker yang sudah terlanjur dipesan, hal itu menjadi tetap dibuat dan berjalan meskipun dapat digunakan dengan terbatas. Berbagai kendala dihadapi diantaranya adalah kendala substansi aturan yang cepat berubah, komunikasi yang sulit berjalan ditengah keterbatasan dan tentunya pemerintah didesak untuk cepat mengeluarkan kebijakan.